

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hendra Nurtjahjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta : Bumi Aksara,
- Icni tri handayani, 2014, *Dalam Skripsinya Tinjauan yuridis terhadap kampanye pemilihan umum kepala daerah dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye*. Universitas Hasannudin,.
- King Faisal Sulaiman. 2017, *Teori dan Hukum Konstitusi*. Penerbit Nusa Media,
- Miftah Thoha. 2005, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Miriam budi, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Jakarta : Gramedia,
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm 105
- Ni'matul Huda, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press,
- Nur Hidayat Sardini, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta. Fajar Media Press
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Robert A Dahl, 2019, *Perihal Demokrasi Pemilu di indonesia*. Topo Santoso dan Ida Budhiarti. Dalam penelitiannya. Sinar Grafika Jakarta,

JURNAL

- Aziz Taufik Hirzi, 2004, *Merancang Kampanye pemilu*, Jurnal Mediator Volume 5, Nomor 1,
- Budiono, 2019, *Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN di Kabupaten Tulungagung)*, : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 2,
- Dodi Faedlulloh dan Noverman Duardji, 2019, *Birokrasi Dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Era Post-Truth*, Jurnal Borneo Administrator, Vol. 15 No. 3,

- Fajar Syadik, Salawati, dan Henrik, 2020, *Netralitas aparatur sipil negara Dalam pemilihan dimasa pandemi 2020*, Volume 3, Nomor 2,
- Harry Setya Nugraha, Dimar Simarmata, Imentari Siin Sembiring , 2018, *Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun* , Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol 3, No. 1,
- Herdiansyah Putra, Eddy Purnama ,Taqwaddin,2015, *Keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara Kaitannya Dengan Asas Efektif Dan Efisien Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 3 No. 4,
- Heri Kusmanto, 2014, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Partisipasi Masyarakat Dalam Demokasi Politik*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik , Volume 2, Nomor. 1,
- Inong , 2015, *Hak Konstitusional Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Pencialonan Sebagai Kepala Daerah* , e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11,
- Jamaluddin,2021, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hukum Pemilu: Studi Antara Netralitas Dan Hak Pilih*, Jurnal sosial dan sains, Vol. 3, No. 1,
- Nur Putri Jayanti, 2019, *Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum*, Jurnal Analis Kebijakan | Vol. 3 No. 1,
- Suaib, A. Muin Fahmal & Kamri Ahmad, 2021, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dan Implikasi Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 8,
- Sudrajat, 2015, T, *Netralitas PNS Dan masa depan demokrasi dalam pilkada serentek 2015*, Jurnal Ilmu Administrasi, XII (3),
- Sudrajat, T., & Karsona, A. M. 2016. *menyoal makna netralitas pegawai negeri sipil dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara*. Jurnal Media Hukum, 23(1),
- Suratman, Hayat, Umi Salamah, 2019, *Hukum Dan Kebijaksanaan Politik*, Refika Aditama, Bandung,
- Tri Wahyuni. 2004, *Analysis On The Exertion To Strenghten The Implementation Of Civil Servant Netrality Policies In The General Election*. Jurnal Analisis Kebijakan Volume 3, Nomor 1.
<https://k-radiojember.com/berita/read/dukung-gus-fawait-maju-calon-bupati-apdesi-jember-rekomendasikan-beberapa-nama-calon-wakil>,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

